

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Pada bagian pendahuluan ini akan menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian, kerangka pemikiran yang digunakan, hipotesis penelitian, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, metodologi, dan sistematika penulisan. Bagian ini menjadi awalan dalam skripsi ini yang akan memberikan penjelasan secara singkat tentang isi skripsi secara keseluruhan. Selain itu, bagian ini akan memberikan gambaran tentang bab-bab berikutnya dalam skripsi ini.

### **A. Latar Belakang**

Konflik berkepanjangan yang terjadi antara Rusia dan Ukraina sejak 2014 hingga sekarang belum menemukan jalan tengah penyelesaian. Invasi yang dilakukan oleh Rusia pada wilayah Ukraina di awal tahun 2022 menciptakan berbagai masalah yang berdampak pada Ukraina hingga Uni Eropa. Invasi yang dilakukan oleh Rusia pada tahun 2022 dilatarbelakangi oleh upaya dan keinginan Ukraina bergabung dengan *The North Atlantic Treaty Organization* (NATO). Rusia memiliki rasa khawatir keamanannya akan terancam jika Ukraina bergabung dengan NATO. Kondisi geopolitik Rusia yang berbatasan langsung dengan Ukraina menjadi faktor yang mempengaruhi (Oktarianisa, 2022). Sejak November 2021 Rusia telah melakukan penumpukan pasukannya diperbatasan antara Rusia dan Ukraina. Pada Desember 2021, Presiden Amerika Serikat Joe Biden memberi peringatan pada Rusia untuk tidak melakukan penyerangan pada Ukraina. Amerika Serikat memberikan ancaman berupa sanksi ekonomi. Pada 17 Desember Rusia mengajukan tuntutan keamanan agar NATO menarik pasukannya di Eropa Timur. Pada Januari 2022 NATO menempatkan pasukan bersenjata dalam keadaan siaga untuk memperkuat Eropa Timur. Amerika Serikat

memberikan tanggapan terhadap tuntutan Rusia dengan mengeluarkan suara yang menyatakan bahwa akan membuka lebar bagi siapa saja yang ingin bergabung NATO. Pada akhirnya Rusia melakukan operasi militer ke Ukraina pada 24 Februari 2022 (Harbani, 2022).

Rusia memiliki anggapan bahwa negara bekas pecahan Uni Soviet masih menjadi bagian dari Rusia. Menurut tulisan berjudul “Intervensi Politik dan Militer Rusia Terhadap Ukraina Sebagai Wujud Penerapan Strategi Deterrens” menjelaskan bahwa langkah yang dilakukan oleh Rusia sebagai sikap *deterrence* yang berguna untuk mencegah pengaruh NATO dan Uni Eropa di daerah Eropa Timur. Masuknya Ukraina sebagai anggota NATO menyebabkan posisi Rusia dikelilingi oleh *buffer state* yang dimiliki oleh NATO (Muhammad et al., 2022, hal. 263–265). Rusia mendapatkan respon negatif dari berbagai negara sehingga mendapatkan sanksi ekonomi. Sanksi ekonomi diterima oleh Rusia seperti pemboikotan perdagangan dan hubungan bilateral dengan Rusia, kontrol sistem keuangan melalui larangan pengiriman uang *SWIFT* dari Rusia, larangan ekspor berteknologi tinggi ke Rusia, pembatasan perdagangan energi, pembekuan asset dari pengusaha Rusia di Eropa (Abonyi, 2022, hal. 179–180). Rusia memberikan respon atas tindakan negatif yang diterima dengan mengeluarkan kebijakan pemberhentian pasokan gas ke Uni Eropa. Pemberhentian pasokan gas memiliki dampak negatif bagi Uni Eropa. Hal itu dikarenakan adanya ketergantungan yang besar dari Uni Eropa terhadap sumber daya energi dari Rusia (Zarkasy et al., 2022, hal. 162).

Uni Eropa memberikan respon terhadap invasi Rusia dengan memberikan sanksi ekonomi yang dikeluarkan pada 8 April 2022. Berdasarkan *Concil regulation (EU) 2022/576 of 8 April 2022 amending Regulation (EU) No 833/2014 concerning restrictive measures in view of Russian’s actions destabilishing the situation in Ukraine*

memutuskan untuk melakukan pembatasan impor tambahan pada barang-barang dari Rusia utamanya komoditas batu bara dan bahan bakar fosil (European Union, 2022, hal. 1). Kebijakan yang dikeluarkan oleh Uni Eropa memiliki dampak pada perdagangan energi khususnya gas bumi antara Rusia dan Uni Eropa. Kebijakan yang dikeluarkan tersebut memberikan efek buruk bagi Uni Eropa karena adanya ketergantungan pada energi dari Rusia.

Ketergantungan Uni Eropa terhadap energi gas dari Rusia menyebabkan adanya krisis energi di Uni Eropa setelah adanya kebijakan pengurangan pasokan energi yang dikeluarkan oleh Rusia. Pasokan gas negara-negara Eropa 1/3 berasal dari Rusia. Berdasarkan data mengenai ketergantungan sumber energi dari Rusia menunjukkan bahwa Jerman memiliki ketergantungan lebih dari 50% pasokan gasnya berasal dari Rusia (Wilkes et al., 2022). Negara lain seperti Prancis dan Italia juga memiliki ketergantungan impor gas dari Rusia masing-masing sebesar 25% dan 49%. Bulgaria, Republik Ceko, Estonia, Hungaria, Polandia dan Slovakia mendapatkan suplai gas antara 75% - 100% dari Rusia (Singarimbun, 2022).

Kebijakan Uni Eropa untuk memberikan sanksi pada Rusia menjadi senjata yang berbalik arah. Hal itu disebabkan oleh ketergantungan Uni Eropa yang sangat tinggi pada perdagangan energi dengan Rusia. Kondisi itu bertolak belakang dengan Uni Eropa yang pada dasarnya sangat membutuhkan pasokan energi dari Rusia yang merupakan tiga aktor utama dalam pasar energi global. Menurut lembaga analisis Bruegel mengatakan bahwa Negara-negara Eropa menghabiskan dana 792 miliar euro untuk menangani krisis energi sejak September 2021. Jumlah ini setara US\$846 miliar atau Rp12.690 triliun (asumsi kurs Rp15 ribu per dolar AS) (CNN Indonesia, 2023). Kondisi yang dialami oleh Uni Eropa tersebut jika tidak ditangani dengan baik akan

memberikan dampak krisis energi yang lebih buruk. Oleh karena itu perlu adanya strategi khusus untuk mengatasi krisis energi yang terjadi di Uni Eropa.

Uni Eropa melalui *European Commission* memberikan respon terhadap krisis energi yang terjadi dengan mengusulkan kebijakan REPowerEU pada tanggal 18 Mei 2022. Kebijakan ini berusaha untuk melakukan transformasi terhadap sistem energi Uni Eropa yang bertujuan pada mengakhiri ketergantungan energi fosil pada Rusia dan mengatasi krisis iklim (European Commission, 2022c, hal. 1). Secara resmi kebijakan REPowerEU disepakati menjadi bagian dari *The Recovery and Resilience Facility* (RRF) oleh *The European Parliament* dan *The Council* pada tanggal 14 Desember 2022 (European Parliament, 2023, hal. 1). Pada 21 Februari 2023, Dewan secara resmi mengadopsi peraturan amandemen. Pada tanggal 27 Februari 2023 regulasi terkait REPowerEU sebagai bagian dari RRF telah resmi diterbitkan melalui *Official Journal of European Union*.

REPowerEU merupakan kebijakan yang berkaitan dengan krisis energi di Uni Eropa. Kebijakan tersebut memiliki tujuan untuk menghapus ketergantungan Uni Eropa terhadap impor gas, minyak, dan batu bara dari Rusia. Fokus lain dari kebijakan ini adalah untuk memberikan dukungan transisi energi bersih terbarukan. REPowerEU juga memiliki keterkaitan dengan investasi terhadap energi bersih yang masuk ke dalam bagian dari *Recovery and Resilience Facility* (RRF). *Recovery and Resilience Facility* merupakan instrumen pendanaan yang dimiliki oleh Uni Eropa untuk membantu negara anggota dalam menghadapi kondisi krisis sejak pandemi Covid-19. Tulisan ini akan berfokus pada bagaimana Uni Eropa merespon krisis energi yang terjadi akibat konflik Rusia dan Ukraina tahun 2022-2023.

## B. Rumusan Masalah

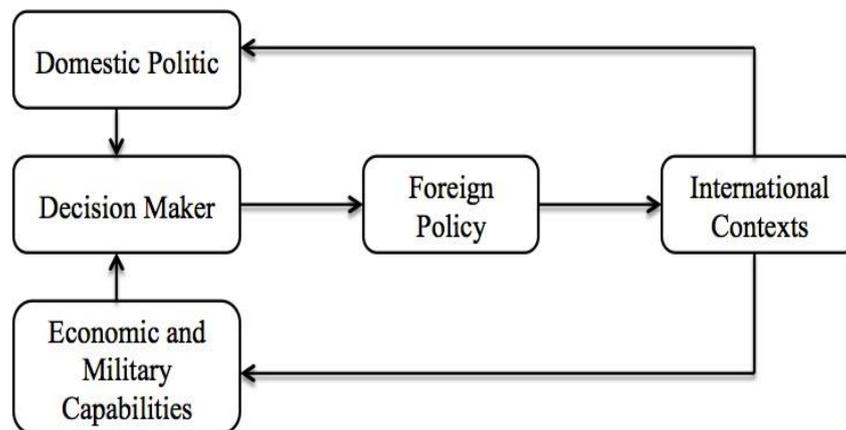
Rumusan masalah penelitian ini adalah : Bagaimana Uni Eropa merespon krisis energi pada tahun 2022-2023 ?

## C. Kerangka pemikiran

### Foreign Policy Decision Making Process William D. Coplin

Kebijakan luar negeri menurut William D. Coplin dapat disimpulkan sebagai interaksi dari tiga faktor yang memiliki pengaruh bagi pengambil kebijakan untuk membuat keputusan politik luar negeri. Faktor-faktor tersebut adalah politik dalam negeri, kemampuan ekonomi dan militer, dan konteks internasional. Kebijakan luar negeri yang diambil merupakan strategi untuk mencapai kepentingan nasional. Berikut adalah gambar dari skema *foreign policy decision making process* menurut William D. Coplin :

Gambar 1 Foreign Policy Decision Making William D. Coplin



Sumber : (Coplin, 1992, hal. 30)

- *Domestic Politic*

*Domestic Politic* atau Politik Dalam Negeri adalah keadaan yang terjadi di dalam suatu negara yang menjadi sebuah pertimbangan bagi

pembuat kebijakan untuk merumuskan kebijakan politik luar negeri. Hal-hal yang bisa dikatakan sebagai bagian dari politik dalam negeri seperti sistem pemerintahan dan budaya yang berlaku di masyarakat umum (Coplin, 1992, hal. 74).

William D. Coplin juga memperkalkan istilah *policy influencers*. Istilah tersebut muncul dari analisa hubungan yang terjadi antara pengambil keputusan politik luar negeri dengan aktor politik dalam negeri yang memiliki pengaruh dalam politik luar negeri. Aktor yang mampu mempengaruhi politik internasional tersebutlah yang diberikan istilah sebagai *policy influencers*. Terdapat empat jenis *policy influencers* menurut William D. Coplin yaitu *bureaucratic influencers*, *partisan influencers*, *interest influencers*, dan *mass influencers* (Coplin, 1992, hal. 81).

- *Economic and Military Capabilities*

Proses pengambilan keputusan luar negeri perlu mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi dan militer. Kondisi ekonomi dan militer akan menyebabkan keterbatasan bagi suatu negara untuk menetapkan kebijakan luar negeri. Negara atau pemerintah perlu melakukan pertimbangan yang bisa menyeimbangkan keterbatasan yang disebabkan oleh kondisi ekonomi dan militer (Coplin, 1992, hal. 110).

Kemampuan ekonomi suatu negara yang memiliki relevansi dengan politik luar negeri adalah kapasitas produksi ekonomi dan ketergantungan ekonomi pada perdagangan dan finansial internasional. Kemampuan militer suatu negara berkaitan dengan tingkat kekuatan

militer, dukungan luar negeri terhadap kekuatan militer, dan partisipasi militer dalam menjaga stabilitas dalam negeri.

Pembahasan terkait masalah ekonomi dan militer tidak hanya tentang masalah kuantitas melainkan lebih dari itu. Negara yang memiliki keunggulan dalam ekonomi dan militer belum tentu menjadi pemenang. Negara yang tidak begitu unggul dalam ekonomi dan militer memiliki kemampuan di bidang lain yang bisa mengimbangi dalam politik internasional. Ketergantungan ekonomi pada masa sekarang lebih bersifat dua arah yang menyebabkan kesulitan jika adanya hubungan ekonomi yang terputus diantara dua negara (Coplin, 1992, hal. 139).

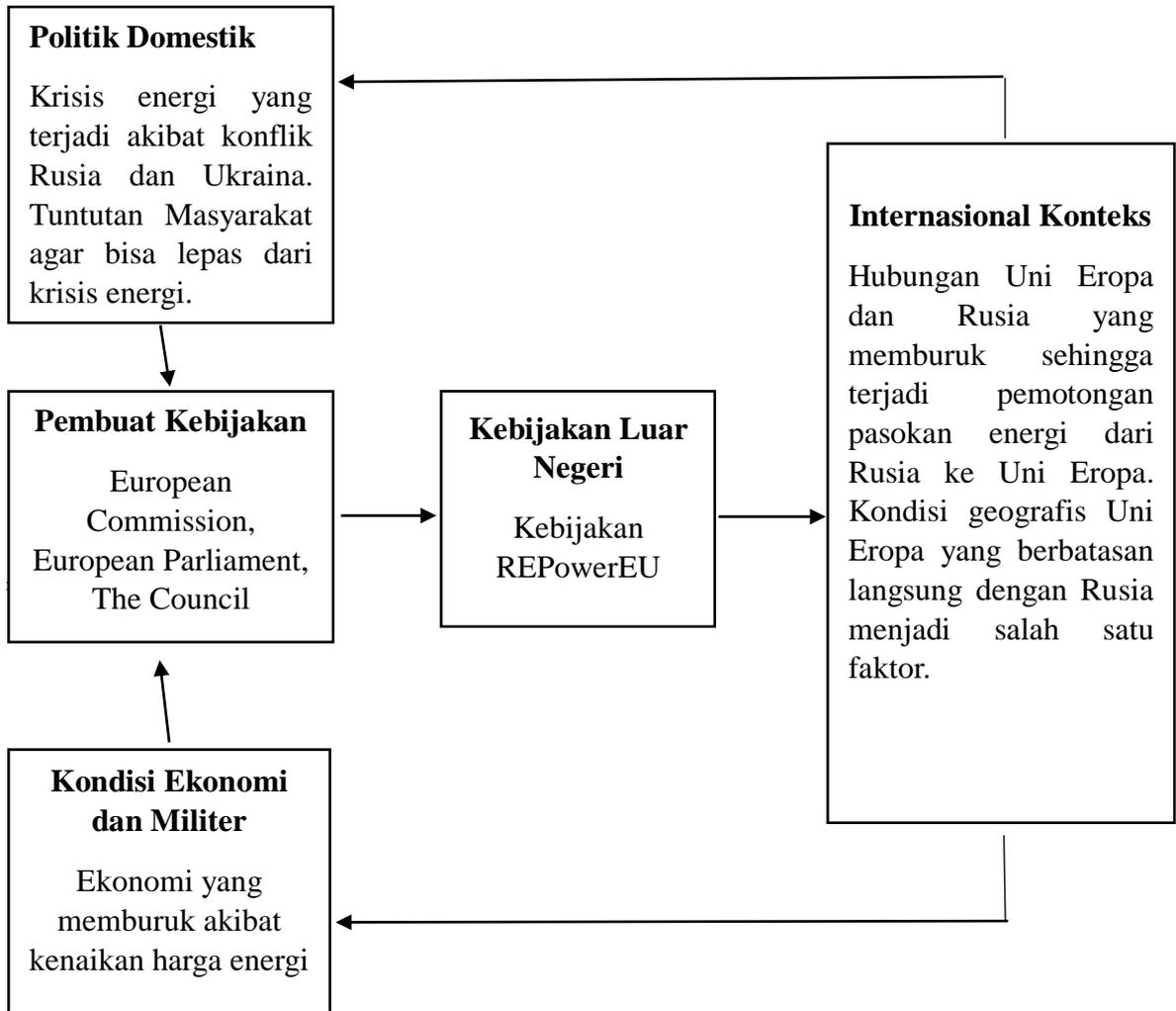
- *International Contexts*

Konteks internasional menjadi salah satu hal yang penting dalam perumusan politik luar negeri. Menurut William D. Coplin terdapat tiga komponen utama konteks internasional yang berkaitan dengan politik luar negeri yaitu geografis, ekonomi, dan politik (Coplin, 1992, hal. 167). Geografi berkaitan dengan lokasi suatu negara dalam kaitannya pada hubungan dengan negara lain. Ekonomi berkaitan dengan arus barang dan jasa serta arus modal sehingga banyak ketergantungan yang terjadi antar negara. Politik berkaitan dengan hubungan politik yang terjadi dengan negara lain yang akan mempengaruhi keputusan politik luar negeri.

- *Decision Maker*

*Decision maker* atau pengambil kebijakan merupakan orang-orang yang bertanggung jawab untuk mengambil sebuah keputusan berdasarkan pertimbangan yang ada (Coplin, 1992, hal. 32).

Gambar 2 Operasionalisasi Teori Kebijakan Luar Negeri William D. Coplin



Berdasarkan gambar operasionalisasi teori maka dapat dijelaskan sebagai berikut. Dalam ruang lingkup politik domestik terdapat beberapa hal yang mempengaruhi seperti tuntutan dari masyarakat terkait masalah pasokan energi. Pasokan energi yang berkurang dan kebutuhan atas energi yang banyak menyebabkan kenaikan harga energi. Ketergantungan Uni Eropa dengan energi dari Rusia menjadi salah satu faktor yang menyebabkan krisis energi. Tuntutan

terjadi pada beberapa titik di Uni Eropa sepanjang 2022 seperti di Jerman, Prancis, Rumania, dan Ceko. Warga Jerman melakukan protes karena subsidi yang lebih mengarah pada industri. Warga Prancis khususnya pekerja di sektor energi menuntut kenaikan gaji sesuai dengan tingkat inflasi. Pengunjuk rasa di Rumania meniupkan terompet dan membunyikan gerendang sebagai protes dan kekecewaan terhadap kenaikan biaya hidup. Masyarakat Ceko melakukan unjuk rasa untuk menentang penanganan pemerintah atas krisis energi (Sadewo, 2022).

Dalam ruang lingkup ekonomi dan militer dapat dijelaskan bahwa adanya kenaikan harga energi akibat krisis energi yang terjadi. Krisis ini terjadi akibat Rusia mengurangi pasokan gas ke Uni Eropa. Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh International Energy Agency (IEA) Eropa melakukan impor gas dengan rata-rata 380 juta meter kubik (mcm) (International Energy Agency, 2022, hal. 4) . Pada Juni 2022, Rusia memotong pasokan gas ke Uni Eropa sebesar 75% dari 170 juta kubik menjadi 40 juta kubik. Pada Juli 2022, Rusia kembali memotong pasokan gas ke Uni Eropa menjadi 20 juta kubik per hari (BBC News, 2022b). Setelah adanya pengurangan pasokan pada akhir tahun 2022 yang dilakukan oleh Rusia ke Uni Eropa jumlah persentase berkurang yang berada di bawah 10% saja sehingga mempengaruhi naiknya harga energi (Abnett, 2023).

Pada tanggal 12 Mei 2022, harga minyak mentah Brent berada di angka US\$ 107,88/barrel. Harga tersebut terbilang lebih rendah dibandingkan puncak tertinggi pada 8 Maret 2022 dengan harga US\$ 127,98/barrel . Walaupun mengalami penurunan, harga minyak mentah masih lebih tinggi dibandingkan sebelum terjadinya konflik antara Rusia dan Ukraina (Logayah et al., 2023,

hal. 106). Kenaikan harga akan menyebabkan aliran energi berkurang yang berdampak pada biaya produksi yang meningkat sehingga merugikan perekonomian Uni Eropa. Energi yang berasal dari Rusia digunakan oleh Uni Eropa untuk kepentingan pemanas, industri dan listrik. Dengan adanya pengurangan pasokan energi dari Rusia akan menyebabkan dampak bagi Uni Eropa (Zettelmeyer et al., 2022, hal. 29).

Dalam ruang lingkup konteks internasional, faktor yang perlu diperhatikan adalah konflik antara Rusia dan Ukraina di awal tahun 2022. Konflik yang terjadi menyudutkan Rusia sehingga banyak negara mengecam aksi yang dilakukan Rusia kepada Ukraina. Uni Eropa menjadi salah satu aktor yang memberikan sanksi yaitu embargo energi dari Rusia. Rusia merespon hal tersebut dengan mengurangi pasokan energi ke Uni Eropa. Uni Eropa yang memiliki ketergantungan terhadap energi dari Rusia merasa terancam dan mengalami krisis energi.

Uni Eropa merupakan salah satu contoh institusi supranasional yang ada di dunia. Supranasional merupakan konsep lembaga yang memiliki sistem politik dengan tiap-tiap negara anggota mengutuskan delegasi sebagai representasi negaranya. Sistem supranasional mengharuskan negara anggota untuk memberikan sebagian dari kedaulatannya kepada institusi. Dalam pengambilan keputusan, prosedur yang digunakan bersifat kolektif dengan setiap bagian dari institusi harus sepakat terkait keputusan yang akan diambil. Kesepakatan yang diambil akan menjadi pedoman dalam bertindak di dalam kawasan atau di luar kawasan Uni Eropa. Dukungan warga negara anggota Uni Eropa melalui *European Parliament* memberikan pengaruh untuk

meningkatkan peran Uni Eropa dalam mengatasi masalah regional dan global (Puspasari, 2020, hal. 82).

Aktor-aktor yang memiliki wewenang untuk mengambil kebijakan perlu memperhatikan tiga hal yaitu politik domestik, ekonomi dan militer, dan konteks internasional. Tahapan proses pengambilan keputusan di Uni Eropa dimulai dengan penyusunan proposal oleh *European Commission* yang akan diajukan kepada *European Parliament* dan *Council of the European Union*. Proposal REPowerEU diajukan oleh *European Commission* pada Mei 2022. Dalam penyusunan proposal *European Commission* mempertimbangkan dampak dari kebijakan yang akan diambil sehingga dapat menyelesaikan masalah yang ada. Kemudian *European Parliament* dan *Council of the European* akan mendiskusikan dalam forum masing-masing. *European Parliament* akan mengajukan amandemen dan melakukan voting terhadap amandemen yang akan dilakukan. *Council of the European* akan memeriksa kebijakan dan menyetujui kesepakatan tentang kebijakan yang diambil. Proses ini disebut dengan *first reading* dimana proposal yang sudah dikaji dan dilakukan diskusi dan voting oleh parlemen dan dewan dapat disetujui, ditolak, atau direvisi. Jika tidak ada kesepakatan antara parlemen dan dewan maka akan diadakan *second reading*. Setelah tiga badan Uni Eropa mencapai kesepakatan maka akan diadakan *third reading* yang nantinya usulan dapat diadopsi sebagai hukum (European Union, 2023).

Dalam proses pemungutan suara khususnya pada *Council of the European* terdapat tiga pilihan yaitu *simple majority*, *qualified majority*, dan *unanimous vote*. *Simple majority* adalah kesepakatan yang didapat melalui voting apabila terdapat setidaknya 15 anggota dewan dari 27 negara anggota

yang menyatakan mendukung. *Qualified majority* adalah kesepakatan yang dicapai ketika 55% negara anggota yang mewakili setidaknya 65% dari populasi UE menyatakan dukungannya. *Unanimity* adalah kondisi voting dimana semua negara anggota mendukung (The Council Of The European, n.d.).

Pada tanggal 21 Februari 2023 *The Council* secara resmi mengadopsi amandemen yang menyatakan bahwa REPowerEU dimasukkan dalam bab *Recovery and Resilience Facility*(Council Of The European Union, 2023). Kebijakan REPowerEU akan menjadi respon untuk menghadapi krisis energi dan melepaskan diri dari ketergantungan terhadap energi yang berasal dari Rusia.

#### **D. Hipotesis**

Respon Uni Eropa dalam menghadapi krisis energi pada tahun 2022-2023 adalah dengan membuat kebijakan REPowerEU.

#### **E. Tujuan**

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Menganalisis bagaimana Uni Eropa merespon krisis energi melalui REPowerEU.
2. Mengetahui apa saja isi kebijakan REPowerEU yang diambil oleh Uni Eropa untuk mengatasi krisis energi tahun 2022-2023.

#### **F. Jangkauan**

Untuk membatasi fokus pembahasan menjadi lebih spesifik penulis menganalisis kebijakan REPowerEU untuk mengatasi krisis energi Eropa tahun 2022-2023.

## **G. Metodologi**

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan tujuan untuk menggambarkan secara naratif fenomena sosial yang terjadi (Anggito & Setiawan, 2018, hal. 7). Penelitian kualitatif dapat dikatakan memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman secara deskriptif terkait masalah sosial. Pendekatan yang digunakan untuk mendukung metode kualitatif adalah deskriptif. Pendekatan deskriptif memiliki makna sebagai penelitian suatu kelompok manusia, suatu subjek, suatu fenomena. Tujuan dari penelitian deskriptif untuk memberikan deskripsi dan gambaran hubungan antar fenomena yang diteliti (Nugrahani, 2014, hal. 90–91). Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku, jurnal, koran, berita, website, e-book, dan lain-lain.

## **H. Sistematika Skripsi**

### **BAB I : Pendahuluan**

Bagian ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesis, jangkauan penelitian, tujuan penelitian, metodologi penelitian dan sistematika skripsi.

### **BAB II : Dinamika dan Latar Belakang Krisis Energi di Uni Eropa tahun 2022**

Bagian ini membahas tentang krisis energi yang terjadi di Eropa yang dimulai dari perang Rusia dan Ukraina pada tahun 2022 yang menyebabkan terjadinya kelangkaan energi di Eropa karena memiliki ketergantungan dengan Rusia.

### **BAB III : Kebijakan REPowerEU Untuk Mengatasi Krisis Energi Uni Eropa Tahun 2022-2023**

Bagian ini akan membahas secara rinci tentang kebijakan REPowerEU yang dibuat oleh Uni Eropa dalam mengatasi krisis energi. Dalam bagian ini juga akan menjelaskan faktor apa saja yang mempengaruhi kebijakan REPowerEU dibuat berdasarkan teori dari William D.Coplin.

#### **BAB IV : Kesimpulan**

Bab IV sebagai penutup yang berisi tentang kesimpulan dari temuan yang ada dalam penelitian ini.